

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah.

Pada hakekatnya masyarakat miskin adalah sumberdaya insani yang memiliki potensi yang dapat didayagunakan dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan nasional. Populasi penduduk masyarakat miskin Riau masih cenderung bertambah terus, pada sisi tertentu sering dipandang sebagai masalah kependudukan yang terus merambah menjadi masalah pembangunan karena pada tataran tertentu mereka akan menjadi beban pembangunan. Namun pada sisi lain justru memandang populasi penduduk masyarakat miskin ini sebagai suatu aset pembangunan, sehingga yang dibutuhkan dalam konteks ini ialah bagaimana mengelola berbagai aset potensi yang melekat pada masyarakat miskin itu menjadi modal atau kekuatan pendorong pembangunan nasional.

Dalam rangka pencarian solusi terhadap fenomena tersebut diatas, telah diupayakan suatu aturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang pada intinya ingin mengangkat sosok masyarakat miskin. Misalnya, sila kedua dari Pancasila yang tertuang dalam UUD 1945 dirumuskan bahwa : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Kemudian, dalam Pembukaan UUD 1945 antara lain dikemukakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.”

Pentingnya masalah pemberdayaan masyarakat miskin tersebut disebabkan oleh masih banyaknya golongan miskin yang belum dapat terberdaya

karena berbagai faktor penyebab yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat eksternal seperti sosial-budaya, kebijakan pemerintah, perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku, faktor geografis, dan kecenderungan-kecenderungan global seperti politik, ekonomi, teknologi komunikasi, dan lain-lain serta faktor-faktor yang bersifat internal seperti persepsi dan konsep diri masyarakat miskin, motivasi, stres kerja, aspirasi pekerjaan, dan karakteristik-karakteristik individu lainnya.

Munculnya fenomena ini telah pula diikuti dengan banyaknya muncul organisasi sosial baik itu LSM, Yayasan, ataupun Forum Warga yang juga turut memberikan perhatian pada fenomena kemiskinan. Berkembangnya organisasi masyarakat sering dianggap sebagai petunjuk tumbuhnya kehidupan demokratis. Studi di pelbagai negara yang telah mengalami proses demokratisasi, seperti Polandia, Brasil, dan Chili menunjukkan bahwa terdapat perkembangan organisasi masyarakat yang pesat setelah rezim otoriternya jatuh. Kebanyakan studi tersebut menunjukkan nilai positif dari kemunculan organisasi tersebut. Organisasi masyarakat yang tumbuh meliputi berbagai bentuk; yaitu informal, formal, berskala ketetanggaan hingga nasional. Polanya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat praktis sampai pada yang berusaha mempengaruhi kebijakan negara.

Harus diakui bahwa di Indonesia, pada era Orde Baru, organisasi sosial yang muncul bentuknya amat terbatas. Hal ini terkait dengan jiwa pemerintahan di masa tersebut, yaitu pengendalian gerak masyarakat oleh negara. Setelah Orde Baru jatuh, organisasi sosial muncul dengan pesat. Terutama sejak era otonomi

bergulir di Propinsi Riau (terutama di Pekanbaru) pertumbuhan organisasi sosial naik menjadi 45 % (Riau Pos, 23 Juni 2002).

Menurut Badan Kesejahteraan Sosial Propinsi Riau melaporkan di Kota Pekanbaru sampai dengan akhir 2005 telah tumbuh sebanyak 26 Organisasi social yang berbentuk Yayasan dan berbadan hukum, sedangkan di Kota Bangkinang sekitarnya berjumlah 12 organisasi sosial. Jumlah ini terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun dan kesemua tujuan organisasi social itu bersifat nirlaba dan semuanya berkeinginan memajukan masyarakat dengan berbagai pola dan jalan yang di tempuhnya. Baik melalui pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sebagai ilustrasi berikut disajikan jumlah organisasi sosial yang ada di Kota Pekanbaru sekitarnya keadaan tahun 2008.

Tabel 1.1.

Daftar Organisasi Sosial/Yayasan/LSM Di Kota Pekanbaru 2008

No.	Nama Organisasi Sosial	Jenis Pelayanan Sosial
1.	Yayasan Ikhwan	Fakir Miskin, anak terlantar
2.	Yayasan Putri Aisyiyah	Idem
3.	Yayasan Permata Citra	Idem
4.	Yayasan Bina Puspa Kencana	Idem
5.	Yayasan Bina Karya Sejahtera	Anak terlantar dan anak jalanan

6.	Yayasan Utama	Anak jalanan, Wanita korban kekerasan, pekerja migran, WTS, ODHA (HIV/AIDS)
7.	Yayasan Thawalib Bakti Mufaruddin	Fakir Miskin, anak terlantar
8.	Yayasan Perkumpulan Kesejahteraan Penyandang Cacat (PKPC)	Penyandang cacat
9.	Yayasan Kemala Persada Lestari	Anak putus sekolah dan fakir miskin
10.	Yayasan Ar Rahim	Fakir miskin dan anak terlantar
11.	Yayasan Sri Mersing	Wanita rawan sosial ekonomi, anak putus sekolah
12.	Yayasan Riau Persada	Penanggulanganm Narkoba
13.	Yayasan Kesatuan Wanita Islam (YWKI)	Anak putus sekolah dan fakir miskin
14.	Yayasan As Shofwa	Anak putus sekolah dan fakir miskin
15.	Yayasan Trini	Penitipan bayi dan anak terlantar
16.	Yayasan Dinamika	Anak putus sekolah dan terlantar
17.	Yayasan Permata Bunda	Fakir Miskin, anak terlantar
18.	Yayasan Al Amin	Fakir Miskin, anak terlantar
19.	Yayasan Tat Twam Asi	Penitipan bayi dan pembinaan anak balita
20.	Yayasan Al Fath	Fakir Miskin, anak terlantar
21.	Yayasan Masmur	Anak putus sekolah dan fakir miskin
22.	Yayasan Riau Buletin	Fakir Miskin

23.	Yayasan Ar-Royan Babussalam	Fakir miskin, anak terlantar dan anak yatim.
24.	Yayasan Keluarga YKWI	Fakir miskin, anak terlantar dan anak yatim.
25.	Yayasan Tunas Bangsa	Fakir miskin, anak terlantar dan anak yatim dan orang jompo
26.	Yayasan Hidup Baru	Jender dan kesehatan reproduksi

Lebih lanjut dikatakan bahwa bentuk-bentuk organisasi sosial yang baru itu kini semakin meluas dan bahkan yang dahulu tidak dikenal justru sekarang muncul dengan berbagai atributnya seperti aliansi masyarakat adat, Laskar pejuang, Laskar Melayu, Hulubalang, Forum warga, serikat buruh dengan berbagai modelnya, dan telah tumbuh di Kota Pekanbaru. Tetapi sejauh ini berdasarkan pantauan data di atas memang untuk jenis-jenis ini belum dilaporkan oleh BKS sebagaimana dapat diamati dari sajian tabel di atas.

Organisasi sosial ini umumnya didirikan untuk bermacam tujuan, tetapi muaranya adalah hampir sama yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Terhadap organisasi itu, salah satu pengamatan yang dapat dilakukan adalah dengan perspektif jauh tidaknya (*social distance*) dengan kepentingan masyarakat. Dengan perspektif ini, ingin dilihat apakah benar mereka memperjuangkan kepentingan masyarakat ? atukah hanya kamulflase dari kelompok-kelompok orang tertentu yang hanya mencari keuntungan dari fenomena otonomi dan euphoria politik sesaat ? Maka dalam kajian ini akan diamati dan dilihat sejauhmanakah peran organisasi social yang ada itu telah

mampu memberikan manfaat dalam pemberdayaan masyarakat ?. Karena harus diakui bahwa organisasi sosial ini memiliki kepengurusan yang baku, berbadan hukum dan juga terkadang memiliki lembaga penyanggah dana dan bantuan dari pihak ketiga, baik yang bersifat hibah maupun pembinaan dari pemerintah maupun swasta. Maka dalam konteks inilah yang ingin dikaji dalam penelitian ini.

Selain itu pertumbuhan yang pesat dalam jumlah organisasi sosial memang sering dipandang sebagai hal positif karena dianggap menunjukkan orientasi independensi terhadap Negara dan munculnya keswadayaan masyarakat untuk membangun. Tetapi juga sebenarnya harus dipahami karena seringkali adanya bias dari penilaian negatif dari kondisi sebelumnya, yaitu keadaan terkungkung, dan masyarakat mencari kesempatan dalam kesempitan. Maka benarkah kemunculan banyaknya organisasi sosial di Provinsi Riau ini telah menunjukkan kemajuan dalam kerangka seperti dikemukakan di atas, yaitu munculnya keswadayaan dan keperdulian masyarakat untuk turut membangun ? Atau sebaliknya justru munculnya organisasi sosial yang ada itu adalah sebagai wahana untuk mencari bantuan dan dana untuk kepentingan kelompok ?. Untuk itu tema sentral dalam kajian ini adalah: Strategi Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah itu, maka rumusan masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Bagaimanakah bentuk dan motif pertumbuhan organisasi sosial yang banyak tumbuh dan hadir di Kota Pekanbaru, terutama pasca era otonomi daerah ?

2. Apakah benar banyaknya organisasi sosial yang ada akan mampu menunjang program K2I terutama dalam kontek pemberdayaan dan penuntasan kemiskinan masyarakat (*pro poor*) di Kota Pekanbaru ?
3. Apakah sajakah peran dan program yang sudah dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan dalam keswadayaan mereka untuk membantu masyarakat (*pro job*) yang sudah dilakukan di Kota Pekanbaru ?
4. Bagaimana Strategi Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini diarahkan pada beberapa hasil :

1. Mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk dan motif pertumbuhan organisasi sosial yang banyak tumbuh dan hadir di Kota Pekanbaru, terutama pasca era otonomi daerah.
2. Menjelaskan peran organisasi sosial dalam menunjang program K2I terutama dalam kontek pemberdayaan dan penuntasan kemiskinan masyarakat (*pro poor*).
3. Menjelaskan program yang sudah dilakukan oleh organisasi sosial dalam keswadayaan mereka untuk membantu masyarakat (*pro job*) yang sudah dilakukan.
4. Mengetahui Strategi Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Pekanbaru ?

1.4. Luaran Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya bagi :

1. Pemerintah Daerah dan Dinas terkait: (BKS, Infokom dan BPPM) sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan formulasi pembinaan dan pembenahan organisasi sosial ke depan.

2. Dari hasil kajian diharapkan akan ditemukan formulasi untuk perbaikan dan pembenahan organisasi sosial untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat ke depan (*pro job*).
3. Dari hasil kajian diharapkan juga akan ditemukan formulasi untuk arah perbaikan ekonomi masyarakat (*pro job*) yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan kelembagaan organisasi sosial yang ada.